

**STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN
DI PESISIR GAMPONG KEUDE BUNGKHAI KECAMATAN MUARA BATU
ACEH UTARA**

Sufi

Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Malikussaleh sufi_djafar82@gmail.com

Abstrak

*Pendefenisian wilayah pesisir dilakukan atas tiga pendekatan, yaitu pendekatan ekologis, pendekatan administratif, dan pendekatan perencanaan. Dilihat dari aspek ekologis, wilayah pesisir adalah wilayah yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan, dimana ke arah laut mencakup wilayah yang masih dipengaruhi oleh proses-proses daratan seperti sedimentasi. Dilihat dari aspek administratif, wilayah pesisir adalah wilayah yang secara administrasi pemerintahan mempunyai batas terluar sebelah hulu dari Kecamatan atau Kabupaten atau kota yang mempunyai hulu, dan kearah laut sejauh 12 mil dari garis pantai untuk Provinsi atau 1/3 dari 12 mil untuk Kabupaten/Kota. Sedangkan dilihat dari aspek perencanaan, wilayah pesisir adalah wilayah perencanaan pengelolaan dan difokuskan pada penanganan isu yang akan ditangani secara bertanggung jawab (Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir, 2000). Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Proses pemberdayaan adalah pembangunan, yaitu sebagai *collective action* yang berdampak pada *individual welfare*. Dengan demikian membangun adalah memberdayakan individu dalam masyarakat yang berarti bahwa keseluruhan personalitas lahir dan batin seseorang ditingkatkan. Jadi pemberdayaan masyarakat berarti membangun *collective personality of a society*. Suatu pembangunan yang tidak berdampak pada individu bukanlah pembangunan (Pomeroy, et al., 1997). Konsep pemberdayaan (*empowerment*) dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Pemberdayaan mengesankan arti adanya sikap mental yang tangguh dan kuat. Dari konsep pemberdayaan tersebut, dapat dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir dan lautan merupakan pemberdayaan masyarakat pesisir untuk memanfaatkan dan mengelola sumberdaya perikanan dan kelautan secara optimal dan lestari sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan khususnya masyarakat Nelayan di pesisir Gampong Keude Bungkhai Kecamatan Muara Batu Aceh Utara.*

Kata Kunci : Strategi Pemberdayaan, Kesejahteraan dan Masyarakat Pesisir (Nelayan).

A. PENDAHULUAN

Indonesia dengan potensi lautnya yang sangat besar, semestinya memberikan harapan, terutama masyarakat nelayan yang mana menjadi masyarakat yang sejahtera. Sehingga dengan kekayaan kelautan yang demikian besar, rasanya tidak percaya jika ternyata belum mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat nelayan. Sebagian besar nelayan Indonesia masih hidup dalam garis kemiskinan. Kriteria miskin tersebut diperlihatkan dengan rendahnya pendapatan nelayan, sehingga mereka masih mengalami kesulitan terhadap pemenuhan kebutuhan dasarakan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan tingkat pendidikan yang layak.

Berdasarkan data World Bank mengenai kemiskinan (2015), bahwa 121,76 juta orang atau 46 persen dari total penduduk Indonesia dalam kondisi miskin dan rentan menjadi miskin. Badan Pusat Statistik (BPS 2015), dengan perhitungan berbeda dari Bank dunia, mengungkapkan angka kemiskinan di Indonesia sebesar 35,83 juta orang (15,27 persen). Angka tersebut diperoleh berdasarkan ukuran garis kemiskinan ditetapkan sebesar 1,55 dollar AS. Sebagian besar (62,52 persen) penduduk miskin di Indonesia berada didaerah pesisir dan pedesaan (BPS, 2015). Berdasarkan jumlah penduduk miskin yang masih sangat besar sebagaimana yang disebutkan diatas maka sebagian besar penduduk miskin adalah masyarakat Nelayan.

Di lain sisi Indonesia memiliki total luas laut sekitar 3,544 juta km² dan memiliki potensi yang sangat besar, mulai dari potensi sumberdaya perikanan baik perikanan tangkap, budidaya laut, perairan umum dan lainnya. Diperkirakan pendapatan dari sektor perikanan mencapai US\$ 82 miliar per tahun, perikanan juga memberikan lapangan kerja yang tidak kecil karena mampu menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 5,35 juta orang yang terdiri dari 2,23 juta nelayan laut; 0,47 juta nelayan perairan umum; dan 2,65 juta pembudi daya ikan. Masalah kemiskinan masyarakat nelayan merupakan masalah yang bersifat multidimensi karena cukup beragam sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh, dan bukan solusi secara parsial.

Untuk menyelesaikannya harus diketahui akar masalah yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan pada masyarakat nelayan. Terdapat beberapa aspek yang menyebabkan terpeliharanya kemiskinan masyarakat nelayan, diantaranya; Kebijakan

pemerintah yang tidak memihak masyarakat miskin, banyak kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan bersifat *top down* dan selalu menjadikan masyarakat sebagai objek, bukan subjek. Kondisi bergantung pada musim sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan, terkadang beberapa pekan nelayan tidak melaut dikarenakan musim yang tidak menentu. Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan peralatan yang digunakan nelayan berpengaruh pada cara dalam menangkap ikan, keterbatasan dalam pemahaman akan teknologi, menjadikan kualitas dan kuantitas tangkapan tidak mengalami perbaikan.

Keberadaan masyarakat nelayan sangat dibutuhkan oleh segala sektor karena ikan merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang setiap saat diperlukan. Perlu penanganan serius dari pemerintah daerah untuk memberdayakan agar mereka dapat hidup layak serta kesehatan mereka dapat terjamin. Qanun Kabupaten Aceh Utara nomor 4 tahun 2009 tentang pemerintah gampong pasal 156 ayat (2) menyebutkan bahwa: Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan gampong wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat ". Wilayah-wilayah pesisir yang memiliki potensi perikanan laut yang menonjol di Aceh Utara antara lain: Kecamatan Seunudon, Dewantara, Syamtalira Bayu, Tanah Pasir, Samudera dan Tanah Jambo Aye, dan Muara Batu.

Dari tujuh kecamatan penghasil ikan laut, Muara Batu dan Dewantara merupakan daerah sentral produksi yang utama di samping Syamtalira Bayu. Kecamatan Muara Batu merupakan salah satu wilayah pesisir yang ada di Aceh Utara dan juga daerah produktif sentral perikanan (ikan laut). Dari 24 gampong yang ada, 12 gampong (desa) terdiri dari desa pesisir, yaitu Pante Gurah, Keude Mane, Tanoh Anoe, Cot Seurani, Meunasah Lhok, Meunasah Baro, Meunasah Drang, Dakuta, Cot Trueng, Meunasah Aron, Ulee Madon dan Keude Bungkaih dengan jumlah penduduk 16.378 dari 24.368 total penduduk seluruhnya, jumlah penduduk miskin pesisir 2.290 orang, dan jumlah nelayan sebanyak 597 orang. Pada hakikatnya kehidupan Masyarakat nelayan identik dengan masyarakat yang miskin, hal ini didasari oleh hasil tangkapan laut yang kurang maksimal serta alat tangkap ikan yang kurang memadai dan tempat penjualan atau tempat pelelangan ikan kurang menjanjikan.

Dengan gaji/penghasilan yang masih dibawah UMK (Upah Minimum Kabupaten) masyarakat pesisir jika cuaca kurang mendukung para nelayan hanya mendapat Rp

20.000/hari, sedangkan UMK daerah Propinsi Aceh sebesar Rp 2.500.000, jika kita kali kan perhari seharusnya Rp 83.000/hari, masih sangat jauh dari apa yang para nelayan dapatkan perharinya. Ada yang berlayar dengan perahu bukan milik sendiri, dan hasil tangkapannya dijual ke tengkulak dengan harga rendah. Itulah yang dirasakan oleh masyarakat di kecamatan Muara Batu. Permasalahan-permasalahan kemiskinan masyarakat nelayan di Desa Keude Bungkaih didasari pada pendidikan rata-rata masyarakat yang tamatan SD dan SMP juga skil yang mereka miliki hanya sebatas mencari ikan dengan alat tradisional, modal yang mereka peroleh setiap harinya apabila melaut adalah dari tengkulak, dan apabila hari ini mereka tidak mendapatkan hasil tangkapan sama sekali, mereka harus berhutang sama tengkulak, dan apabila keesokan harinya. mendapat hasil yang sedikit, tengkulak tidak segan-segan untuk langsung memotong hutang kemarin mereka. Sangat disayangkan apabila nelayan tidak mendapatkan ikan yang banyak setiap harinya.

Seharusnya pemerintah daerah menyiapkan modal usaha bagi nelayan pada setiap desa, agar masyarakat nelayan tidak bergantung pada tengkulak. Jenis-jenis program kegiatan pemberdayaan yang telah dilakukan di Keude Bungkaih kepada masyarakat nelayan adalah seperti pembagian alat penangkapan ikan pertahun yang diterima bergilir oleh setiap individu atau kelompok nelayan, karena kurangnya bantuan makanya dibagikan secara bergilir, sampai sekarang masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan giliran. Secara umum, tempat pelelangan resmi sangat dibutuhkan oleh para nelayan Gampong Keude Bungkaih Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara karena maraknya tengkulak.

Namun demikian fenomena tersebut belum tentu akan sejalan dengan hasil penelitian yang akan dilakukan nantinya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Studi Gampong Keude Bungkaih Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara.

B. LANDASAN TEORITIS

Strategi Peningkatan Kesejahteraan Nelayan

Salah satu indikator keberhasilan sebuah strategi adalah pencapaian tujuan yang telah direncanakan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sejauh ini strategi yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam memberdayakan para nelayan miskin sudah

baik, hal tersebut bisa dilihat dari peningkatan yang terus-menerus. Tetapi pihak pemerintah harus lebih menekankan lagi dalam memilih strategi yang akan digunakan untuk memberdayakan para nelayan, karna banyak didapati bahwa nelayan tersebut tidak menggunakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan oleh Pemerintah dalam memberdayakan para nelayan dalam katagori miskin.

Strategi Pemberian Bantuan Peralatan Nelayan

Alat tangkap adalah peralatan yang digunakan nelayan dan pemancing untuk mendapatkan ikan dan hewan laut lainnya, alat tangkap ini juga dikategorikan dalam beberapa jenis yaitu, kait, benang pancing, pemberat, batang pancing, roda pancing, umpan, indikator gigitan, tombak, jaring ikan, jebakan ikan. Pemberian alat tangkap dan boat sangat membantu para nelayan dalam mencari ikan, karena alat pancing sendiri merupakan hal pokok yang utama yang dibutuhkan para nelayan setelah boat. Alat tangkap juga sangat diperlukan untuk meningkatkan keuntungan para nelayan, dan alat tangkap yang di berikan harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para nelayan tersebut sehingga hasil yang didapatkannya juga menjadi maksimal.

Bantuan yang diberikan oleh pemerintah adalah berupa alat tangkap dan boat untuk nelayan miskin. Tidak ada syarat khusus untuk mendapatkan bantuan tersebut, nelayan hanya membuat kelompok dengan jumlah 12 orang dan mengajukan proposal ke pusat untuk meminta bantuan, kemudian bantuan akan disalurkan kepada para nelayan dengan beberapa alat tangkap lengkap dan 6 (enam) boat untuk satu kelompok. Bantuan diberikan kepada nelayan dengan perantara penerima bantuan, penerima bantuan akan melihat dan memilih nelayan mana saja yang pantas dan layak untuk mendapatkan bantuan, kemudian para nelayan membuat proposal yang akan diajukan ke dinas dan setelah itu barulah bantuan tersebut disalurkan kepada masyarakat nelayan, sebelumnya diadakan sosialisasi bagi para nelayan yang mendapatkan bantuan dengan cara mengajari penggunaan alat bantuan yang diberikan oleh pemerintah, sosialisasi yang diberikan hanya sekali sebelum penyerahan bantuan dan setelahnya tidak ada sosialisasi atau pengawasan kembali.

Pemberian bantuan yang diberikan bersifat bergilir yaitu dimana semua Gampong yang ada disekitaran Muara Batu akan bergilir mendapatnya, tidak hanya satu kelompok saja yang terus-menerus mendapatkannya. Kemudian pula sifat bantuan yang diberikan

kepada nelayan bersifat hibah, semua alat pancing dan boat yang telah diberikan kepada nelayan maka menjadi hak nelayan sepenuhnya untuk menggunkan tanpa harus mengembalikannya kembali. Setiap tahunnya dari pemerintah akan meminta data-data nelayan di Gampong untuk diberikan bantuan alat tangkap dan Boat.

Kemudian strategi ini sangat penting untuk para nelayan dalam mengembangkan dirinya dalam mendapatkan keuntungan dari pemberian alat pancing tersebut. Hal tersebut bisa dilihat dari nelayan yang sudah berkembang dan mendapatkan keuntungan lebih, misalnya tidak perlu berbagi hasil dengan Toke Bangku, semua keuntungan yang didapatkan hanya akan dipergunakan untuk dirinya saja. Ini adalah salah satu fakta yang bisa kita lihat dari berhasilnya strategi pemberian alat tangkap kepada nelayan miskin. Untuk Pemerintah juga harus lebih melihat kembali apa saja yang dibutuhkan para nelayan selain berupa alat tangkap dan boat, lebih memberikan strategi gambaran baru dalam menangkap ikan dan mengasihkan ikan yang lebih banyak kedepannya dan bisa mensejahterakan para nelayan miskin yang ada di keude bungkah.

Kendala yang dihadapi Pemerintah dalam Pemberdayaan masyarakat Nelayan Hambatan Internal Jumlah Bantuan dan Anggaran

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi dimasa yang akan datang, seluruh kegiatan perusahaan/instansi untuk jangka waktu tertentu. Salah satu hambatannya yaitu kurangnya anggaran yang disalurkan oleh pemerintah untuk para nelayan.

Bantuan yang diberikan hanya untuk beberapa kelompok saja yang terdiri dari beberapa orang misalnya dua atau tiga kelompok saja, selebihnya masih banyak masyarakat nelayan yang tidak kebagian dalam pemberian bantuan tersebut, masih banyak nelayan yang membutuhkan bantuan dari pemerintah tapi sama sekali belum tersentuh oleh pemerintah. Kemudian untuk penerimaan bantuan yang diberikan banyak yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakatnya, alat pancing yang diberikan bukan alat pancing dengan merek yang bagus tapi dengan merek kualitas yang kurang baik dan juga ukuran yang diinginkan oleh pemancing dan yang diberikan oleh pemerintah tidak sama sangat berbeda.

Bantuan yang diberikan tidak bisa merangkul semua nelayan yang ada, hal tersebut dikarenakan bantuan yang diberikan tidak hanya berpusat pata suatu kcamatan atau gampong saja tapi seluruh kabupaten Aceh Utara, makanya menyebabkan banyak nelayan

yang belum mendapatkan bantuan, dari hasil penelitian juga bisa dilihat bahwa pemberdayaan yang diberikan menyeluruh untuk semua dan bergilir tidak semuanya mendapatkan bantuan tapi harus menunggu giliran mendapatkan bantuan tersebut.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi baik instansi maupun perusahaan pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang diperkerjakan disebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Hambatan yang dialami oleh instansi salah satunya yaitu Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM).

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu yang sangat penting bagi perusahaan atau instansi dalam upaya mengembangkan perusahaannya. Dalam proses pemberdayaan bagi masyarakat miskin para staf yang bekerja dibagian tersebut sangat kewalahan karena kurangnya SDM yang bekerja dibagian pemberdayaan masyarakat miskin. Tugas yang dikerjakan lebih banyak dari staf yang bekerja sehingga pekerjaan yang dilakukan akhirnya menjadi tidak efisien.

Pemberian bantuan yang diberikan kepada masyarakat berupa alat pancing, boat dan alat tangkap, sebelum pihak dinas memberikan bantuan tersebut mereka mengadakan sosialisasi kepada para nelayan yaitu tata cara penggunaan alat pancing yang benar dan itu semua dilakukan oleh staf yang bekerja dibagian perkantoran karena kurangnya tim pengawasan lapangan. Sehingga hal tersebut juga sangat berpengaruh kepada pengawasan yang kurang optimal, hanya pengawasan dilakukan ketika pemberian bantuan tersebut, kurangnya SDM tersebut sangat berpengaruh penting terhadap pengawasan.

Kurangnya pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam penetapan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut, pengawasan juga proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan sangat di perlukan oleh dinas kelautan, salah satu kendala yang di hadapi yaitu kurangnya pengawasan setelah memberikan bantuan boat dan alat tangkap.

Banyak nelayan yang melakukan kecurangan setelah mendapatkan bantuan, seperti

tidak menggunakan alat yang diberikan oleh pemerintah dan menjualnya dengan keperluan pribadi, dan uang tersebut dibagikan rata masing-masing nelayan. Oleh karena itu pengawasan terhadap sangat penting untuk dilakukan, apabila setiap mendapatkan bantuan selalu di jual maka nelayan tidak akan berkembang dan pendapatan ekonomi juga tidak meningkat, hal itu disebabkan ketergantungan nelayan dengan Toke Bangku sehingga hasil atau pendapatan yang didapatkan harus di bagi dengan Toke Bangku, selain itu juga pemerintah ingin membantu ketergantungan tersebut, tetapi tidak tercapai karena tidak adanya pengawasan.

Hambatan Eksternal

Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kesadaran sama artinya dengan mawas diri, kesadaran juga diartikan sebagai kondisi dimana individu memiliki kendali penuh terhadap stimulasi internal maupun eksternal. Serta kendala lainnya yang dihadapi oleh Pemerintah adalah kurangnya kesadaran masyarakat. Yang perlu kita ketahui bahwa masyarakat harus punya keinginan dalam menggunakan atau mempergunakan bantuan yang diberikan. Pemerintah telah memberikan bantuan berupa alat tangkap dan boat, seterusnya kembali kepada Nelayan itu sendiri bagaimana cara menggunakan bantuan yang telah diberikan. Seperti banyak nelayan yang menjual bantuan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga apa yang diberikan oleh pemerintah, keinginan pemerintah supaya para nelayan miskin berkembang dan terpedaya akan sia-sia apabila nelayan sendiri tidak punya motivasi dan keinginan yang besar untuk berubah menjadi lebih baik setelah mendapatkan bantuan tersebut.

Oleh karena itu kesadaran masyarakat sangat diperlukan supaya strategi yang ada dapat berjalan dengan semestinya. Ketika pemerintah sudah membantu mengayomi para nelayan dengan memberikan bantuan alat tangkap dan boat, maka dari pihak masyarakat juga harus punya keinginan untuk menjadi lebih baik, bukannya dengan menjual bantuan yang diberikan oleh pemerintah, karena Pemerintah hanya bisa membantu dari luar selebihnya balik lagi kepada pribadi masyarakat nelayan tersebut.

Kurangnya partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan

keputusan tentang alternatif solusi untuk menanggapi masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi di dalam suatu kelompok.

Keikutsertaan masyarakat dalam ikut dalam proses pemberian bantuan adalah hal utama yang sangat diinginkan oleh masyarakat nelayan, tapi yang terjadi adalah banyak masyarakat nelayan yang tidak bisa berpartisipasi dalam hal tersebut karena kuota yang diberikan oleh pemerintah sangat terbatas dan hanya untuk orang-orang tertentu saja untuk orang yang terplih dan layak mendapatkan bantuan. Apabila melihat langsung dari masyarakat nelayannya semua diantara mereka ingin ikut berpartisipasi dalam pembuatan proposal sehingga bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah, tapi hal tersebut bisa dicapai oleh sebagian masyarakat nelayan karena bermasalah pada jumlah kuota yang ditawarkan oleh pemerintah sangat minim.

C. PENUTUP

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dalam pembahasan penelitian ini, maka peneliti dapat merumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut : Strategi pemerintah dalam memberikan pemberdayaan kepada masyarakat nelayan yaitu dengan cara memberikan bantuan berupa alat tangkap dan boat kepada nelayan, strategi tersebut sangat berpengaruh terhadap meningkatkan hasil tangkapan para nelayan, sehingga sangat membantu para nelayan dan bisa mensejahterakan nelayan pada umumnya. Hambatan internal yaitu kurangnya jumlah bantuan dan anggaran, kurangnya Sumber Daya Manusia, serta kurangnya pengawasan. Hambatan eksternal yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya partisipasi masyarakat. Sesuai dengan tujuan dan manfaat penelitian yang diharapkan dalam hasil penelitian dilapangan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut : Dalam menjalankan strategi pemberdayaan masyarakat nelayan, pemerintah harus benar benar melihat strategi yang paling cocok untuk para nelayan meningkatkan kesejahteraan pemerintah harus meningkatkan pemberian bantuan berupa alat tangkap dan boat kepada para nelayan dan juga harus memberikan bantuan berupa modal usaha, karena banyak juga nelayan yang membutuhkan perkembangan dalam meningkatkan hasil yang maksimal. Dari factor hambatan internal ada kurangnya jumlah bantuan dan anggaran, kurangnya sumber daya manusia, dan kurangnya pengawasan disini pemerintah harus meningkatkan lagi sistem

pengawasan dalam distribusi bantuan dan pengawasan dalam pemanfaatan bantuan oleh nelayan penerima bantuan. Dari faktor hambatan eksternal ada kurangnya kesadaran dan partisipasi dari masyarakat, pemerintah harus lebih memberikan sosialisasi motivasi untuk para nelayan agar nelayan memiliki kesadaran dan keinginan untuk berkembang dan mandiri dalam mensejahterakan hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambar Teguh S, (2004). *Merubah Watak Negara Strategi Penguatan Partisipasi Kampung*, Tim Lapera Pustaka Utama Jakarta
- Assaury, Sofyan, 1993 *Dasar Konsep dan Strategi*, LPFE, 1V, Jakarta.
- Febuana, Ngarto. *Manual Sumber Daya Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah*, Banda Aceh: International Organization for Migration, 2008.
- Friedman, Marilyn M. 1992. *Family Nursing. Theory & Practice*. 3/E. Debora Ina R.L. 1998 (alih bahasa). Jakarta: EGC
- Hanna, robinson, Hikmat, (2006), *Pengaruh Utama Partisipasi Masyarakat*, C.V. Cepruy, Jakarta.
- Irawan Soejito, *Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1983
- Kartasasmita, G. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan pertumbuhan dan pemerataan*. Penerbit PT Pustaka Cidesindo, Jakarta.
- Kartiko, Restu. 2010. *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Koentjaraningrat. 2000. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta. Rineka Cipta.
- Kusnadi. *Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*. 2000. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Kusnadi. 2007. *Jaminan Sosial Nelayan*. Yogyakarta : Lkis Pelangi Aksara. Leibo, Jefta. 1995. *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta: Andi offset.
- M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI dan CV.Sinar Bakti , 1988,h.256
- Mubyarto. 2000. *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta, BPEF.
- Setiana, lucie. *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Bogor: Ghalia

Indonesia, 2005

- Soekartawi. 1998. *Prinsip Dasar: Komunikasi Pertanian*, UI Press, Jakarta. Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarno, Siswanto. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Suryabrata, sumadi. 2009. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: rajawali pers Umar, Husein. 2005. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Umar, Husein. 2009. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Usman, Sunyoto. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Wrihatnolo, Dwijowijoto, (2007). *Administrasi Program Dan Proyek Pembangunan*, IKIP, Malang.
- Yusuf. 2003. *Strategi Alternatif Pengentasan Kemiskinan*, Yogyakarta, P3PK, Universitas Gajah Mada.

Web:

- <http://dhonypratama.com/upah-minimum-regional-2013>
- <http://klhacehutara.blogspot.co.id/2011/07/laut-pesisir-dan-pantai-aceh-utara.html>
- <http://pemerintah.net/fungsi-pemerintah/>
- <http://wargamasyarakat.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-masyarakat-pesisir.html>
- <http://zarifah91.blogspot.co.id/2013/05/masyarakat-pesisir.html>
- https://carapedia.com/pengertian_definisi_masyarakat_menurut_para_ahli_info48